



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : JAMASON SINAGA
- Jabatan** : INSPEKTUR WILAYAH II
- NHK** : 55681

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 264.100.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, VARIO BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
- MOBIL, INNOVA MOBIL PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- MOTOR, VARIO VARIO 125 CBS ISS SP ACC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 569.568.229

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.303.668.229

III. HUTANG Rp. 417.826.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 885.842.229

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.